



**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

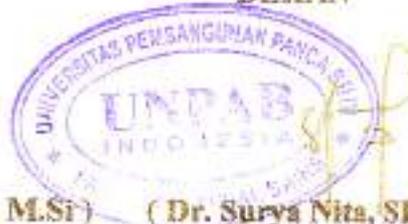
NAMA : PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA

Medan, 26 Juni 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si)

PEMBIMBING II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
Lengkap FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA

Medan, 26 Juni 2019

KETUA



(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si) (Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

ANGGOTA II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)

ANGGOTA III

(Aulia, S.E., MM)

ANGGOTA IV

(Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117
Fakultas/Program Studi: SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH BELANJA DAERAH,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP
KEMISKINAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA
UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izinhak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, Mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menocrima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila diterima dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 02 April 2019



(Putra Alfi Ramadhan)
NPM 1515100117

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRA ALFI RAMADHAN
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/ 24 Maret 1993
NPM : 1515100117
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jln. Monel Anwar link 07

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 April 2019



(Putra Alfi Ramadhan)
NPM : 1515100117

BIODATA

DATA- DATA PRIBADI

Nama : Putra Alfi Ramadhan
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 24 Maret 1993
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. M. Anwar Link 07
No. HP : 0857 6065 9679

PENDIDIKAN FORMAL

1. Lulusan SD Negeri 060954 Medan
2. Lulusan SLTP Negeri 38 Medan
3. Lulusan SMK Negeri 12 Medan
4. Lulusan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

PENDIDDIKAN INFORMAL

Mengikuti Pelatihan Pendidikan Pelayaran di STIP Jakarta

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 02 April 2019

Penulis

PUTRA ALFI RAMADHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAHAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : PUTRA ALFI RAMADHAN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Maret 1993
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100117
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.22

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
PENGARUH PAJAK HOTEL,PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BINJAI	<input type="checkbox"/>
PENGARUH RETRIBUSI DAERAH,PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BINJAI	<input type="checkbox"/>
PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA	<input checked="" type="checkbox"/>

Hal yang ditandatangani Kepala Program Studi:


 (Tri Dikri Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 12 November 2018

Pemohon,

(Putra Alfi Ramadhan)

Nomor :
 Tanggal :



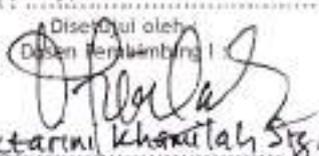
Tanggal : 12-11-2018

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.)

Tanggal : 12-11-2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:


 (Dikarini Khairat, Sg., SE., M.Si.)

Tanggal : 13-11-2018

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:


 (Yenni Sani Kiani, Sg., SE., M.Si.)

No. Dokumen: FM-LRPM-08-01

Revisi: 02

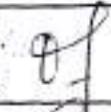
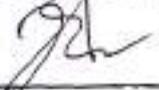
Tgl. Eff: 20 Des 2015

Nama : Putra Alfi Ramadhan

NIM : 1515100117

Program Studi : Akuntansi

Kelas : Reguler/Eksekutif (Pagi, Siang, Sore / Jum'at - Sabtu)

No	Nama Peserta Seminar Proposal / Ipt	N.P.M	Dosen Pembimbing	Paraf
1.	Lia Aulia 25 Januari 2019	1515100108	Pembimbing 1 Detarini Wahidiah Siragadhis	1. 
			Pembimbing 2 Hermawati Suman	2. 
2.			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
3.			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
4.			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
5.			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.

Medan, 25/01/2019
Ka. Program Studi


Argyi Perumpi Nasution Sidiqi

Nama : Putra Alti Panathan

N.I.M : 1515 100 117

Program Studi : Akuntansi

Kelas : Reguler Siang

No	Nama Peserta Seminar Proposal / Tgl	N.P.M	Dosen Pembimbing	Paraf
1.	Sri Wina Br. Bukit 31 oktober 2018	1515310021	Pembimbing 1 Dr. H. Henry	1.
			Aspan, SE, SH, MA, MH	
			Pembimbing 2 Husni Muhram	
			Ruhana, BA, M. Sc	
2			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
3			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
4			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.
4			Pembimbing 1	1.
			Pembimbing 2	2.

Medan, 31 - October 2018
Ka. Program Studi

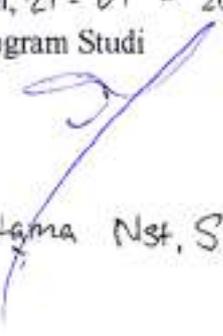


(Nurifma Siregar SE, Msi)

Nama : Petra Alti Darmadani
 N.I.M : 1515100117
 Program Studi : Akuntansi
 Kelas : Reguler / Eksekutif (Pagi), Siang, Sore / Jumat - Sabtu

No	Nama Peserta Seminar Proposal/ Tgl	N.P.M	Dosen Pembimbing	paraf
1	LUH KANDI AYU TANGKAS	1515100389	1. Rahima br. Purba, SE, M. Si., Ak., C.A. 2. Heryul Azwar Hasibean, SE M. Si.	 
2			1. 2.	1. 2.
3			1. 2.	1. 2.
4			1. 2.	1. 2.
5			1. 2.	1. 2.
6			1. 2.	1. 2.

Medan, 21 - 01 - 2019
 Ka. Program Studi


 Arggi Pratama Nst, SE., M. Si.

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 19 Februari 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas Sosial Sains
 Universitas Pembangunan
 Pancabudi
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA ALFI RAMADHAN
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Maret 1993
 Nama Orang Tua : YAFRILMAN,S.
 N. P. M : 1515100117
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085760659679
 Alamat : JL. M. ANWAR LINGK 07

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
 Pembimbing 2 : YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp-	600.000	<i>21/02/19</i>
Total Biaya	: Rp-	600.000	

Judul SKRIPSI :

Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara



Hormat saya

Putra Alfi Ramadhan
 PUTRA ALFI RAMADHAN
 1515100117

Catatan:

- 1.*) Coret yang tidak perlu ;
 - a. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 (tiga) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

as : Universitas Pembangunan Panca Budi
 embimbing I : SOSIAL SAINS
 embimbing II : Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si
 mahasiswa :
 Program Studi : PUTRA ALFI RAMADHAN
 Akuntansi
 NIM / NPM : 1515100117
 Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi :

PEMBAHASAN BELANJA DAERAH, PETA DAPATAN ASLI DAERAH DAN
 PERTUNJUKAN EKONOMI TERHADAP KEMUKKILAN PADA PEMERINTAH
 KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
-19	Perbaiki latar belakang masalah sesuai dgn identifikasi masalah, Rumusan Tujuan, Kerangka Konseptual dan Teknik analisis data	<i>[Signature]</i>	
-19	Perbaiki Identifikasi masalah, Teori variabel, tabel penelitian, tabel definisi operasional	<i>[Signature]</i>	
-19	Perbaiki Identifikasi latar belakang masalah, kerangka konseptual, teori APBD, Daftar Pustaka Ace of Seminar proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 24 Januari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh:

Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (081) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Instansi : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS

Pembimbing I : YUMITA SARI RUMI, SE., M.Si

Pembimbing II : PUTRA ALFI RAMADHAN

Nama Mahasiswa : Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100117

Jurusan Pendidikan

Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH BELANJA LAERAH PEMERINTAH AULI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA

NO	UJIAN	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
		- Daftar pustaka	Ysm	
		- Tinjauan pustaka Mak.la thn terakhir		
		- Perbaikan tulisan & spasi		
		- tabel		
		- Rumusan masalah		
1/19		- Teori dasar mak.la thn terakhir	Ysm	
1/19		ACC SKRIPSI PROPOSAL	Ysm	

Medan, 24 Januari 2019.

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Acc & Sluwaan
Proposal
Putra
25
1 2019

**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM 1515100117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ACC Seminar Proposal
y. h. h. 5/02/19
YB II



**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 50 200 511 PO.BOX.1099 Medan.
<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

ini dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 14.00 Wib, bertempat di Seminar Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan telah dilaksanakan Seminar Proposal kepada :

: PUTRA ALFI RAMADHAN

: 1515100117

Studi : Akuntansi

Sketsa : PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA

Pembimbing - I : Oktarina Khamilah Sig, SE, M.Si

Pembimbing - II : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si

Berdasarkan hasil dari Tim Seminar, bahwa Proposal Skripsi (Out Line) yang diseminarkan dianggap Layak / Tidak Layak, dan masih Perlu disempurnakan dengan materi sebagai berikut :

1. Materi Perbaikan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Tambahkan teori " tentang kemiskinan
buat Tabel di Bab I tentang data kemiskinan
Dibuat Sumber teori nya.
Metode Penelitian

Team Penguji,
Pembimbing - I

YUNITA SARI RIONI

Pembimbing - II

YUNITA SARI RIONI

IRAWAN

Diketahui Oleh,



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Medan, 4 April 2019

Nomor : B-0099/BPS/1256/04/2019
Hal : Permohonan Research

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Nomor: 4479/17/FSSA/2019 tanggal 1 April 2019 perihal diatas. Bersama dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Nama : Putra Alfi Ramadhan
NPM : 1515100117
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Diberikan izin research di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara di Jalan Asrama No.179 Medan. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyelesaikan Skripsi pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Demikian surat ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

A.n. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara
Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik



Jr. Masta Juwita Gurning MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455671
website : www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
SOSIAL SAINS
Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si

Pembimbing I
Pembimbing II
Mahasiswa
PUTRA ALFI RAMADHAN

Program Studi
Akuntansi
1515100117

Pendidikan
Tugas Akhir/Skripsi
STRATA -1
REVISI BELAJAR DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAN KOTA DI SUMATERA UTARA.

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1-2019	Perbaiki kerangka konseptual, Hasil penelitian perkembangan variabel dan pembahasan, Kesimpulan serta saran	<i>Of</i>	
1-2019	Perbaiki f tabel dan t tabel hasil di lampirkan, Pembahasan secara simultan, Uji R dan Abstrak dan Kata pengantar	<i>Of</i>	
1-2019	Perbaiki dan fortajun latar belakang dan kerangka konseptual, serta pembahasan. Acc of Sidang Mata Hijau	<i>Of</i>	

Pembimbing I
Of
Oktarina Khamilah Srg, SE, M.Si

Medan, 24 Januari 2016
Diketahui/Disetujui oleh
Gatan,



Dr. ... S.H., M.Hum

C Sidang
dan Hijau
7/05/19 y
Hijau



Acc y Sidang
Meja Hijau
Hijau
8/4 - 2019

**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 23 Mei 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAE Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRA ALFI RAMADHAN
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 24 Maret 1993
Nama Orang Tua : YAFRILMAN, S.
N. P. M. : 1515100117
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085760689679
Alamat : J. M. Anwar Link 07

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKRI yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diikid lux 7 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (Bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKROL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbd :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Rp 4350.000
2250.000
23/05/19

Ukuran Toga : L



Hormat saya

PUTRA ALFI RAMADHAN
1515100117

Catatan:

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAE Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk : Fakultas - untuk BRAA (asal) - Mhs.ybc.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

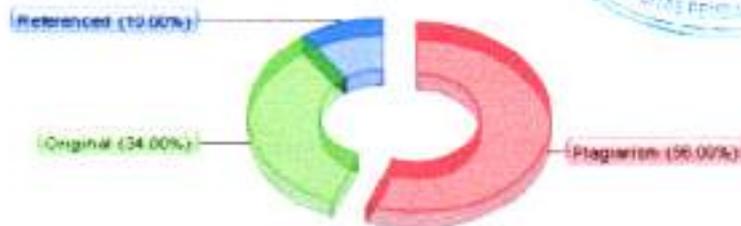
Analyzed document: 22/05/2019 11:14:18

"PUTRA ALFI RAMADHAN_1515100117_AKUNTANSI.docx"

Licenced to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism

% 54	wrds: 7364	https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_Indonesia
% 52	wrds: 6591	http://eprints.iain-surabaya.ac.id/16151/1/FULL%20TEKS.pdf
% 34	wrds: 4422	http://ejournal.stkip-pgri-sumbang.ac.id/index.php/economic/article/download/403/655

Show other Sources:}

Processed resources details:

270 - Ok / 51 - Failed

Show other Sources:}

Important notes

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan
htt://www.pancabudi.ac.id
Medan – Sumatera Utara - Indonesia

Nomor. : 5206/16/FSSA/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Tugas Menghadiri Ujian Skripsi.

Kepada Yth. : Saudara

1. Ketua : Anggi Pratama Nst, SE.,M.Si
2. Anggota - I : Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
3. Anggota - II : YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si
4. Anggota - III : Aulia, SE., MM
5. Anggota - IV : Pipit Buana Sari, SE, MM

di-

Medan.

Dengan hormat, bersama surat ini kami menugaskan saudara untuk menghadiri Ujian Meja Hijau Mahasiswa/i :

Nama : **PUTRA ALFI RAMADHAN**
NPM : 1515100117
Fakultas / Prodi : Sosial Sains / Akuntansi
Hari / Tanggal : Rabu /26 Juni 2019
J a m. : 10.00 Wib
Ruangan : Seminar Fakultas Sosial Sains

Judul Skripsi: ***PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA***

Demikianlah kami sampaikan, atas kehadiran saudara di ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Juni 2019
D e k a n,

Dr. Surya Nita, SH.,M.Hum



Acc 4/10/2019
lex
F. H. H. H.
12/7 - 2019.

**NGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM 1515100117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



ACC Dilled Lux

13/09/19

y. hantika
PB II

**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

Ace jibg lux
[Signature]



**PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

PUTRA ALFI RAMADHAN
NPM : 1515100117

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskina Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data skunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, Sehingga unit Sampel analisis yaitu 30 sampel penelitian (6 Kabupaten/Kota X 5 Tahun) yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Karo, Kota Medan dan Kota Binjai dan penelitian di ambil dari tahun 2013 sampai 2017. Penelitian ini di lakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara berada di jalan Asrama No. 179 Medan. Model Statistik yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan analisis deskriptif, pengujian asumsi klasik (uji Normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis (uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), uji determinasi (uji R²) pada level signifikan 5% ($\alpha= 0,05$) dan menggunakan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 21. Hasil penelitian ini menurut uji Hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.. Tetapi secara simultan (uji f) di tunjukkan bahwa Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Dan berdasarkan nilai R Square (R²) atau koefisien determinasi adalah 0,863 yang berarti sebesar 0,863 atau (86,3%) variabel independen belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, mampu menjelaskan Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

ABSTRACT

This research is to find out the Effect of Regional Expenditures, Regional Original Revenue and Economic Growth on the Ministry of Religion in District and City Governments in North Sumatra. The type of data used is secondary data. The population in this study were 33 regency and city governments in North Sumatra Province, so that the sample analysis unit was 30 research samples (6 districts / cities X 5 years) namely Langkat Regency, Deli Serdang Regency, Serdang Bedagai Regency, Karo Regency, Medan City and The city of Binjai and research were taken from 2013 to 2017. This research was conducted at the Central Sumatra Provincial Statistics Agency (BPS) on No. 1 Dormitory street. 179 Medan. The statistical model used is by multiple linear regression analysis using descriptive analysis, testing classical assumptions (Normality test, multicollinearity test, heterocedasticity test, autocorrelation test), multiple linear regression analysis, hypothesis testing (partial test (t test), simultaneous test (f test), determination test (R2 test) at a significant level of 5% ($\alpha = 0.05$) and using the SPSS program (Product and Service Solution Statistics) version 21. The results of this study according to the hypothesis test show that partially (t test) Regional Expenditures have a significant effect on Poverty In District and City Governments in North Sumatra and Regional Original Income and Economic Growth have no significant effect on Poverty in District and City Governments in North Sumatra ... But simultaneously (f test) shows that Regional Expenditures, Regional Original Income and Economic Growth have a significant effect on Poverty in District and District ta in North Sumatra. And based on the value of R Square (R2) or the coefficient of determination is 0.863 which means that is 0.863 or (86.3%) the independent variable of regional expenditure, Regional Original Income, and Economic Growth, is able to explain Poverty in Regency and City Governments in North Sumatra. While the remaining 13.7% is influenced or explained by other variables not included in the research model.

Keywords: Regional Expenditure, Regional Original Revenue, Economic Growth and Poverty

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diajukan untuk memperoleh gelar Strata -1 (S-1) Fakultas Sosial Sains Jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA”.

Penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu dengan tangan terbuka dan kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan sarannya demi membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik berupa didikan, bimbingan, dan dukungan moral dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu perkenalkanlah penulis mengutarakan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, antara lain :

1. Bapak Drs. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis.
6. Ayahanda Yafrilman S dan ibunda saya Rastik , kakak kandung Seftika afrianti dan Yulinda Dewi Canti, adik kandung Nurul Qoidah dan juga seluruh keluarga besar terima kasih atas semua doa, perhatian dan limpahan kasih sayang sepenuhnya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan motivasi belajar.
8. Seluruh pegawai dan Staff Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah menjadi sahabat terbaik dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sahabat-sahabatku yang telah mengukir cerita suka dan duka dalam kehidupan penulis, antara lain : Abdul Aziz Nasution, Muhammad Yasir, Pratama Wibowo Putra dan terima kasih buat Dian Anggra Ini Lubis, S.E., yang telah mendukung dan memberikan support kepada saya dalam penulisan skripsi ini, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu. Terimakasih buat persahabatannya, semoga jalinan persahabatan kita abadi selamanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga bantuan tersebut mendapat amal yang berlipat ganda. Kiranya Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Amin YaRabbal Alamin.

Medan, 02 April 2019

Penulis,

Putra Alfi Ramadhan

1515100117

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kemiskinan	11
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	13
a. Belanja Daerah	14
b. Pendapatan Asli Daerah	23
c. Pembiayaan	26
3. Pertumbuhan Ekonomi	27
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
1. Variabel Penelitian	35
2. Definisi Operasional	35
D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37
1. Metode Analisis	37
2. Pengujian Asumsi Klasik	38

a. Uji Normalitas	38
b. Uji Heterokedasitas	39
c. Uji Autokorelasi	39
d. Uji Multikolinearitas	39
3. Pengujian Hipotesis	39
a. Uji Parsial (Uji t)	39
b. Uji F-Stastistik (Pengujian Secara Simultan)	40
c. Uji Determinasi (Uji R^2)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	42
a. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara	42
b. Sejarah Singkat Pemerintah Sumatera Utara.....	44
2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara	47
3. Perkembangan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara	49
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara	50
5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara	51
B. Statistik Deskriptif	52
C. Pengujian Asumsi Klasik	54
1. Uji Normalitas	54
2. Uji Multikolinearitas	57
3. Uji Heterokedastisitas	57
4. Uji Autokorelasi	58
D. Metode Regresi Linier Berganda	59
E. Pengujian Hipotesis.....	61
1. Uji Parsial (uji t)	61
2. Uji Simultan (uji F)	64
3. Koefisien Determinasi (R^2)	65
F. Pembahasan.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pergeseran sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah ini, maka menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi daerah adalah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang nasional. Indikator utama keberhasilan pembangunan nasional salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin Indonesia. Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang.

Tercapinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2009)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu di negara maju maupun Negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbagai. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Badrul Munir (2010), suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah pesat, padahal sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang. Secara Pemerintahan pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara juga memiliki jumlah Penduduk miskin yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar 114.410 Jiwa pada Kab. Deli Serdang sebesar 97.090 Jiwa pada Kab. Serdang Bedagai sebesar 56.930 Jiwa pada Kab. Karo sebesar 40.020 Jiwa pada Kota Medan sebesar 204.220 Jiwa dan pada Kota Binjai sebesar 18.230 Jiwa.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas termasuk bagi pemerintahan pada Sumatera

Utara. Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah Pendapatan dari Realisasi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Jenis-jenis Belanja daerah terdiri dari : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Daerah yang di dapatkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar Rp. 2.320.218.855.000,- pada Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 3.377.738.242.000,- pada Kab. Serdang Bedagai sebesar Rp. 1.390.898.227.000,- pada Kab. Karo sebesar Rp. 1.520.826.759.000,- pada Kota Medan sebesar Rp. 4.395.825.170.000,- dan pada Kota Binjai sebesar Rp. 849.614.205.000,-. Realisasi pendapatan yang di dapatkan dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan suatu daerah. Mengapa belanja daerah menjadi salah satu tolak ukur dari penurunan jumlah penduduk miskin di pemerintahan di Sumatera Utara di karenakan Realisasi belanja daerah yang di dapatkan di suatu daerah dapat membantu perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maka belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur untu menurunkan jumlah penduduk miskin di pemerintah Sumatera Utara.

Begitu juga realisasi dari Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari Pajak Dearah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

yang di dapatkan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara yang tercatat pada tahun 2017 di antaranya pada Kab.Langkat sebesar Rp. 139.717.648.000,- pada Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 849.286.151.000,- pada Kab. Serdang Bedagai sebesar Rp. 103.711.290.000,- pada Kab. Karo sebesar Rp. 157.866.721.000,- pada Kota Medan sebesar Rp. 1.739.756.924.000,- dan pada Kota Binjai sebesar Rp. 139.217.622.000,-. Realisasi pendapatan yang di dapatkan dapat memenuhi semua kebutuhan pembiayaan suatu daerah. Begitu juga pada pendaptan yang di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah mengapa, pendapatan asli daerah juga termasuk salah satu yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin pada pemerintah sumatera utara di karenakan hasil yang di peroleh dari jenis-jenis yang terdapat di dalam Pendapatan Asli daerah. Seperti pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari pendapatan yang di hasilkan oleh jenis-jenis PAD tersebut dapat membantu membangun pembangunan di suatu daerah tersebut.

Dan Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2017 pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, Antara lain: Kab. Langkat sebanyak 5,05 Jiwa, Kab. Deli. Serdang sebanyak 5,10 Jiwa, Kab. Serdang. Bedagai sebanyak 5,16 Jiwa, Kab. Karo sebanyak 5,21 Jiwa, Kota Medan sebanyak 5,81 Jiwa dan Kota Binjai sebanyak 5,39 Jiwa. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi suatu tolak ukur untuk menurunkan jumlah penduduk miskin pada pemerintah sumatera utara dikarenakan pertumbuhan ekonomi itu komponen penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunnn ekonomi

dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan dalam daerah tersebut.

Didalam angka tingkat Kemiskinan pasti Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi yang sangat berpengaruh di angka tingkat Kemiskinan.. Pada perinsipnya semangkin besar sumbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap suatu daerah akan menunjukkan semangkin kecil jumlah penduduk miskin di suatu daerah tersebut.

Dan tujuannya dalam arti luas untuk pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan.

Sehubung dengan Uraian dan Penjelasan diatas, dan besarnya pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Angka Tingkat Kemiskinan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan memilih judul penulisan skripsi yaitu : **“PENGARUH BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa yang menjadi identifikasi masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah belum mampu menutupi Belanja Daerah yang berguna dapat mengurangi penduduk miskin pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
- b. Pertumbuhan Ekonomi meningkat setiap tahun tetapi tidak bisa mengurangi jumlah penduduk miskin pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

2. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini yang faktor mempengaruhi Angka Kemiskinan adalah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada periode 2013 sampai dengan 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Parsial terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara ?
2. Apakah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Parsial terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara .
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara Simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara .

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini :

1. Memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan sehingga dapat di ketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.
2. Bermanfaat untuk menambah Keperpustakaan dan dapat digunakan sebagai refrensi penelitian dan analisis yang sejenis.
3. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi untuk menurunkan Angka Kemiskinan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dari sebelumnya dari Rendy Bayu Adha (2016), Universitas Lampung yang berjudul : “ Pengaruh Belanja

Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Lampung)

Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara. Perbedaan Penelitian ini terletak pada :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah dan variable terkait Kemiskinan. Sedangkan Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan variabel terkait yaitu Kemiskinan.
2. Jumlah Observasi/Sampel (n) : Penelitian terdahulu menggunakan data dari tahun 2011-2013. Sedangkan Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2013-2017.
3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2016 (2011-2013). Sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2019 (2013-2017).
4. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di lakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

Perbedaan Model Penelitian, Variabel Penelitian, Jumlah Observasi/Sampel (n), Waktu dan Lokasi Penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Menurut Bappenas tahun 2004 kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat di hindari oleh seorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Ritonga 2010 menyatakan bahwa “Kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang di perlukan oleh penduduk atau rumah tangga”. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan

Kemiskinan seseorang atau kelompok orang laki-laki maupun perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat diantaranya, terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Adapun hak – hak dasar tersebut antar lain :

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan.
- b. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan.
- c. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan,.
- d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

a. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua golongan antara lain :

1. Kemiskinan kultural
2. Kemiskinan struktural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan kultural biasanya dicirikan oleh sikap individu atau kelompok masyarakat yang merasa tidak miskin meskipun

jika diukur berdasarkan garis kemiskinan termasuk kelompok miskin. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang timpang, baik karena perbedaan kepemilikan, kemampuan, pendapatan dan kesempatan kerja yang tidak seimbang maupun karena distribusi pembangunan dan hasilnya yang tidak merata. Kemiskinan struktural biasanya dicirikan oleh struktur masyarakat yang timpang terutama dilihat dari ukuran-ukuran ekonomi.

Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan pro-poor.

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pada Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember”. Sedangkan menurut Halim (2009), “APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang

dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya merupakan batas maksimal untuk satu periode anggaran. Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Daerah.

a. Belanja Daerah

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Yuwono dkk, 2010 menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

1) Jenis-jenis Belanja Daerah

a) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui diseluruh SKPD sebagai pengguna anggaran. Kelompok Belanja Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari :

(1) Belanja Pegawai

Digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pakaian dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

(3) Belanja modal.

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli aset/bangunan.

Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pengadaan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja dan jasa.

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara periodik.

Kelompok Belanja Tidak Langsung dibagi menurut Jenis Belanja terdiri dari :

(1) Belanja Pegawai

Merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk dalam pengertian tersebut uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji, dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta

penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

(2) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(3) Belanja Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(4) Belanja Hibah

Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(5) Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan diberikan tidak secara terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

(6) Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan teknis kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Belanja Bantuan Keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

(8) Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Daerah juga salah satu menjadi tolak ukur untuk mengukur jumlah angka kemiskinan di daerah tersebut. Makin tinggi angka indeks ini maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan indeks yang menunjukkan sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk penelitian ini, konsep pengukuran kemiskinan mengikuti salah satu konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu dengan ukuran indeks kemiskinan (*head count index-P0*). Hal ini terkait juga dengan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang dikeluarkan oleh BPS. Selain itu, ukuran indeks kemiskinan paling banyak digunakan untuk mengukur kemiskinan.

Beberapa belanja daerah yang menjadi tolak ukur untuk mengukur jumlah angka kemiskinan di suatu daerah antara lain :

1. Belanja Daerah Urusan Pendidikan

Pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menjamin terselenggaranya pendidikan dasar bagi warganya dengan mengalokasikan anggaran di sektor pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 49 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan

selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Investasi dalam sumber daya manusia (*human capital*) terutama di bidang pendidikan dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja.

2. Belanja Daerah Urusan Kesehatan

Terdapat tiga tujuan pembangunan menurut Todaro dan Smith (2011) salah satunya adalah peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan. Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi semua orang untuk menjalani kehidupan. Bagi kelompok masyarakat miskin, kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang paling dasar. Karena tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin yang tidak sehat akan mengganggu produktivitasnya, yang selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraannya.

Pengeluaran pada sektor pendidikan dasar dan segala jenis fasilitas pelayanan kesehatan secara bertahap dan terbukti dapat mengurangi ketimpangan. Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan akses masyarakat atas pelayanan kesehatan serta perbaikan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui alokasi anggaran di bidang kesehatan.

3. Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting yang tak terpisahkan bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan infrastruktur telah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini dilakukan melalui badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah seperti disebutkan dalam pasal 4 ayat 1. Terkait dengan pendanaan, pasal 4 ayat 3 undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu
- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan
- d. Pembangunan listrik pedesaan

Sementara itu, penyediaan infrastruktur jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dimana pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa penguasaan atas jalan ada pada Negara.

Yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat 2 bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. Wewenang yang dimaksud meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 2.

4. Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Pertanian

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, sehingga pembangunan bidang pertanian sangat penting bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terutama bagi petani di pedesaan. Menurut Wibowo (2014) pembangunan pertanian bukan semata proses peletakan pondasi dan pembenahan struktur pertanian dalam peta perekonomian, namun upaya serius dan sistematis untuk menerjemahkan paradigma keberpihakan ke dalam langkah nyata yang dapat dimengerti dan dilaksanakan masyarakat banyak.

Sehingga sektor pertanian menjadi penting dalam perekonomian negara dalam kaitannya dengan terbukanya kesempatan kerja dan ekonomi bagi masyarakat miskin di pedesaan. Diharapkan dengan pembangunan sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Undang-undang tersebut juga menyebut bahwa tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

1) Sumber Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Kriteria pajak daerah secara spesifik terdiri dari empat hal, yaitu :

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah itu sendiri.

(2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

(3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

(4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menurut wilayah kekuasaan pihak pemungutnya, yaitu :

1. Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah tingkat Provinsi, yang terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota yaitu Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, yang terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

b) Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2009) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sedangkan yang disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemotongan atau pemungutan retribusi tertentu.

Jenis-jenis Retribusi Daerah :

(1) Retribusi Jasa Umum

- (2) Retribusi jasa Usaha
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (5) Lain – lain PAD yang sah

Lain – lain PAD yang sah yang dimaksud adalah : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Antara lain :

- 1. Jasa Giro
- 2. Pendapatan Bunga
- 3. Keuntungan Selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 4. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan

c. Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan yang mencakup :
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)
 - 2) Pencairan Dana Cadangan
 - 3) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
 - 4) Hasil Penjualan Aktiva Daerah yang Dipisahkan
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 - 6) Penerimaan Piutang Daerah

- b. Pengeluaran Pembiayaan yang mencakup :
 - 1) Pembentukan Dana
 - 2) Investasi (Penanaman Modal) Pemerintah Daerah
 - 3) Investasi Jangka Pendek
 - 4) Investasi Jangka terdiri dari Investasi Permanan dan Non Permanen
- c. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Sisa Lebih Pendanaan Anggaran Tahun Berjalan

3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut ekonomi kliasik pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi antara lain :

- a. jumlah penduduk
- b. jumlah stok barang dan modal
- c. luas tanah dan kekayaan alam
- d. tingkat tekhnologi yang digunakan

Menurut Kuznets (2009) Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja
- b. Akumulasi Modal
- c. Kemajuan Teknologi

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

B. Penelitian Terdahulu

Adapun berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini terangkum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Rendy Bayu Adha/ 2016	Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Lampung).	1. Belanja Daerah (X1) 2. Kinerja Keuangan Daerah (X2)	Kemiskinan	Metode regresi berganda data panel dengan model efek tetap	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2	Aswar Talib/ 2016	Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengangguran (X1) 2. Pertumbuhan Ekonomi (X2)	Kemiskinan	Analisis regresi berganda dengan metode OLS (<i>Ordinary</i>)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara simultan variabel tingkat pengangguran

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pinrang.			<i>Least Square</i>)	dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten pinrang. Sedangkan secara parsial tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Pinrang.
3	Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran/ 2014	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado tahun 2004-2012.	1. Dana Alokasi Umum (X1) 2. Belanja Langsung (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Kemiskinan (Y2)	Analisis Deskriptif Dan Analisis Induktif Atau Analisis Inferensia	Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, serta penggaruh, dan pengujian secara sendiri-sendiri pengaruh Dana Alokasi Umum dan belanja Langsung terhadap Kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan di Kota Manado, begitu pula dalam pengujian secara gabungan,

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Model Analisis	Hasil Penelitian
						dimana secara bersama-sama variabel Dana Alokasi umum, Belanja Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Manado.
4	Andyka Arief Pratomo/ 2015	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Dki Jakarta.	1. Pendapatan Asli Daerah(X1) 2. Dana Alokasi Umum (X2) 3. Dana Bagi Hasil (X3) 4. Belanja Daerah (X4)	Kemiskinan	Model Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemiskinan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap angka kemiskinan. Hasil pengujian pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka Kemiskinan. Hasil pengujian pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel (X)	Variabel (Y)	Model Analisis	Hasil Penelitian
5	Ani dan Dwirandra/ 2014	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Pekanbaru.	1. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) 2. Pertumbuhan Ekonomi (X2) 3. Pengangguran (X3)	Kemiskinan	Model Analisis Linier Berganda	Secara parsial dan simultan tingkat kemampuan/kemandirian, aktivitas keuangan, efektivitas, efisiensi dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Sumber : Rendy Bayu Adha (2016), Aswar Talib (2016), Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran (2014), Andyka Arief Pratomo (2015), Ani dan Dwirandra (2014).

C. Kerangka Konseptual

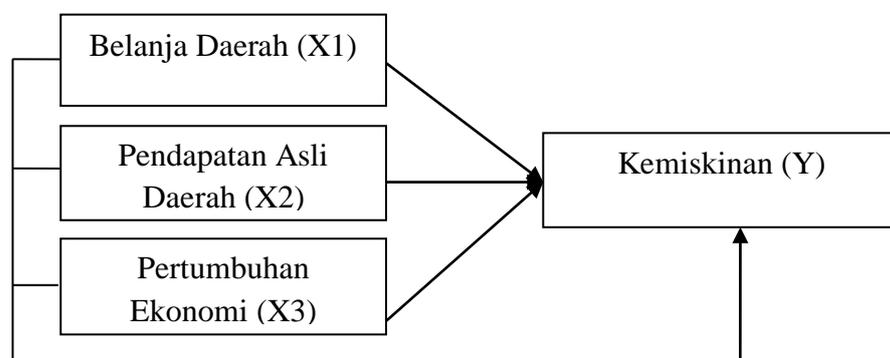
Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Didalam Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, Akumulasi Modal dan Kemajuan Teknologi.

Sedangkan Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan utama otonomi daerah. Dimana, pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Dari uraian diatas, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Erlina (2010), Hipotesis adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan preposisi yang dapat diuji secara empiris.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis dari Penelitian ini yaitu :

1. Belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Secara Parsial terhadap Kemiskinan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Sumatera Utara
2. Belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Secara Simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kasual antara dua variabel atau lebih.

Menurut Sugiyono (2009 : 13) Deskriptif Kuantitatif adalah teknik yang di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Alamat : Jl. Asrama No.179 Medan.

Waktu Penelitian dilaksanakan Bulan November 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Berikut ini rincian tabel waktu penelitian adalah :

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2018-2019																	
		Nov			Feb			Mar			Apr			Mei			Jun		
1	Judul Pengajuan	■																	
2	Penyusunan Proposal	■			■														
3	Seminar Proposal							■											
4	Perbaikan Proposal							■	■										
5	Pengumpulan Data										■	■							
6	Pengelolaan Data											■							
7	Penyusunan Skripsi												■						
8	Penulisan Skripsi													■					
9	Sidang Meja Hijau																		■

Sumber : Penulis, 2019

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu : Belanja Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) serta variabel terkait yaitu Kemiskinan (Y).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
1	Belanja Daerah (X1)	Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik dan pembangunan. (Yuwono dkk, 2010)	Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (Yuwono dkk, 2010)	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (X2)	1. Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah. 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. 4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunanya.	Rasio

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
			(Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	
3	Pertumbuhan Ekonomi (X3)	1. Jumlah Penduduk 2. Jumlah Stok Barang-barang Modal 3. Luas Tanah dan Kekayaan Alam 4. Teknologi (Sadono Sakirno, 2013)	Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. (Sadono Sakirno, 2013)	Rasio
4	Kemiskinan (Y)	1. Penduduk Miskin. 2. Garis Kemiskinan. 3. Tingkat Kemiskinan. 4. Pengukuran Jumlah dan Tingkat Penduduk Miskin dengan Survey Sosial Ekonomi Nasional. (Bappenas, 2004)	Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Bappenas, 2004)	Rasio

D. Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2009) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah 33 Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sugiyono, (2009) “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yaitu Random Sampling. Menurut Sugiyono, (2009) “ Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Maka sampel dalam penelitian ini ada 6 Kabupaten/Kota yaitu 4 Kabupaten seperti (Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Karo) dan 2 Kota seperti (Kota Medan dan Kota Binjai) sehingga unit amatan analisis adalah 30 (6 Kabupaten/Kota X 5 Tahun).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data yang di peroleh dari berbagai sumber yang telah ada. Sumber data dari Badan Pusat Statistik seperti laporan statistik keuangan pemerintah daerah di tahun 2013 sampai dengan 2017 dalam buku Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dalam Angka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini guna untuk mendapat data dalam membahas skripsi dengan cara Studi Dokumentasi. Studi Dokumentasi itu adalah pengumpulan data yang di ambil langsung dari laporan keuangan.

F. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditulis untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Sumatera Utara. Dan Untuk Memprediksi nilai variabel positif dan negatif daari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Rumus regresi linier sederhana adalah :

$$K = \beta_0 + \beta_1 BD + \beta_2 PAD + \beta_3 PE + e$$

Keterangan :

K = Jumlah Penduduk Miskin

β_0 = Konstanta

β_1 BD = Belanja Daerah

β_2 PAD = Pendaptan Asli Daerah

β_3 PE = Pertumbuhan Ekonomi

e = Eror

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Yang merupakan distribusi normal dapaat dilihat dari nilai signifikan atau probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal dan sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka distribusi data adalah normal.

b. Uji Heterokedasitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini akan menunjukkan adanya korelasi antara anggota observasi lain yang berlawanan waktu. Autokorelasi artinya korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lainnya.

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah korelasi linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Jika korelasi kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas dan jika korelasi lebih dari 10 maka dapat dikatakan ada multikolinearitas.

3. Pengujian Hipotesis**a. Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya variabel independen mempengaruhi variabel dependen menggunakan t-test. Hipotesis yang digunakan adalah :

H_1 : Ada pengaruh signifikan antara Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

H_2 : Tidak Ada pengaruh signifikan antara Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Kriteria yang digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis ini, yaitu : Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau p value pada kolom sig $< 0,05$ *level of significant* (σ), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau p value pada kolom sig $> 0,05$ *level of significant* (σ), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

b. Uji F-Statistik (Pengujian Secara Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mengetahui variabel dependen, maka digunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Jika nilai F lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali : 2016).

c. Uji Determinasi (Uji R^2)

Uji Determinasi merupakan suatu ukuran yang sangat penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terkait Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

a. Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara berda di bagian barat Indonesia, terletak pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Luas daratan provinsi Sumatra Utara adalah $71.680,68 \text{ Km}^2$, sebagian besar berada d daratan pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di pulau Nias, pulau – pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun di bagian Timur pantau pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah kabupaten Mandailing Natal dengan luas $6.620,70 \text{ Km}^2$, atau sekitar 9,23% dari total luas Sumatera utara, diikuti kabupaten Langkat dengan luas $6.263,29 \text{ Km}^2$ atau 8,74%, kemudian kabupaten Simalunggun dengan luas $4.386,60 \text{ Km}^2$.

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten

Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematang Siantar.

Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai. Karena terletak dekat garis khatulistiwa. Provinsi Sumatera Utara tergolong kedalam daerah beriklim tropis.

Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai $33,4^{\circ}\text{C}$, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhunya minimalnya bisa mencapai $23,7$. Sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, provinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai

dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

b. Sejarah Singkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara berdiri pada tanggal 15 April 1948 dengan wilayah mencakup tiga keresidenan, yaitu Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Pada saat itu ibukota dari Sumatera Utara adalah Kutaraja yang sekarang menjadi banda Aceh, dan dikepalai oleh seorang gubernur. Gubernur Sumatera Utara yang pertama adalah Mr. S.M. Amin.

Awal tahun 1949 diadakan reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI tanggal 17 mei 1949 Nomor 22/Pem/PDRI yang mengatakan bahwa jabatan gubernur Sumatera Utara dtiadakan, selanjutnya dengan ketetapan pemerintah Darurat RI tanggal 17 Desember 1949 di bentuk provinsi Aceh dan provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur yang kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan ini dicabut dan kembali dibentuk provinsi Sumatera Utara.

Tanggal 7 Desember 1956 di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan provinsi Sumatera Utara yang artinya wilayah Sumatera Utara dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonomi provinsi Aceh. Di provinsi sumatera utara juga terdapat visi dan misi antara lain :

1) Visi Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan provinsi Sumatera Utara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu visi merupakan simpul dalam menyusun rencana strategis pembangunan provinsi Sumatera Utara. Sebagai gambaran identitas masa depan provinsi Sumatera Utara maka, visi provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a) Sumatera Utara yang Maju
- b) Sumatera Utara yang Sejahtera
- c) Sumatera Utara dalam Harmoni Keberagaman

2) Misi Provinsi Sumatera Utara

Untuk mempertegas tugas dan tanggungjawab pembangunan dari seluruh *stakeholder* maka visi pembangunan provinsi Sumatera Utara dijabarkan ke dalam misi yang jelas, terarah, dan terukur. Misi ini menjelaskan tujuan dan saran yang ingin dicapai dalam pembangunan provinsi sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan peran masing-masing masyarakat dalam pembangunan. Adapun misi provinsi Sumatera Utara adalah :

- a) Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun, dan damai dalam kesetaraan. Yang bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan maka arah

kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor-sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, usaha kecil dan menengah dan pariwisata.

- b) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Yang bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
- c) Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religious, dan keberagaman. Yang bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan

suasana yang aman dan damai serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

- d) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan. Yang bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada: penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*): memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan memburuknya perekonomian nasional pada umumnya dan juga perekonomian regional pada khususnya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Perekonomian berangsur membaik, akan tetapi masalah kemiskinan masih merupakan masalah

utama yang belum terselesaikan, karena masih tingginya jumlah penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Berikut data beberapa jumlah penduduk miskin pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera utara :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Tahun 2013-2017

No	Kabupaten dan Kota pada Pemerintah di Sumatera Utara	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2013	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2014	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2015	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2016	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2017
1	Kab. Langkat	104.310	100.630	114.190	115.790	114.410
2	Kab. Deli Serdang	91.970	90.920	95.650	100.090	97.090
3	Kab. Serdang Bedagai	56.550	54.480	58.300	58.170	56.930
4	Kab. Karo	36.930	35.360	37.520	38.740	40.020
5	Kota Medan	209.690	200.320	207.500	206.870	204.220
6	Kota Binjai	17.480	16.720	18.600	17.800	18.230

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, 2018

Dari tabel 4.1 Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin tampak selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah penduduk miskin pada beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara relatif terus mengalami peningkatan. Dan jumlah penduduk miskin memiliki nilai minimum pada Kota Binjai tahun 2014 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2013.

3. Perkembangan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 “Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam priode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Faktor keuangan merupakan salah satu factor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintah. Karena semakin besar pendapatan yang di hasilkan maka banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut data Realisasi Belanja Daerah di beberapa Pada Pemerintah Kabupatean dan Kota Di Sumatera Utara.

Tabel 4.2 Realisasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Tahun 2013-2017

No	Kabupaten dan Kota pada Pemerintah di Sumatera Utara	Realisasi Belanja Daerah (Rp 000) Tahun 2013	Realisasi Belanja Daerah (Rp 000) Tahun 2014	Realisasi Belanja Daerah (Rp 000) Tahun 2015	Realisasi Balanja Daerah (Rp 000) Tahun 2016	Realisasi Belanja Daerah (Rp 000) Tahun 2017
1	Kab. Langkat	1.536.811.928	1.605.301.211	1.934.943.728	2.287.199.857	2.320.218.855
2	Kab. Deli Serdang	2.034.622.489	2.392.252.735	2.735.624.355	3.005.435.387	3.377.738.242
3	Kab. Serdang Bedagai	982.962.075	1.010.452.029	1.221.917.604	1.465.701.623	1.390.898.227
4	Kab. Karo	901.675.565	889.667.378	1.326.869.181	1.542.011.009	1.520.826.759
5	Kota Medan	3.224.449.048	4.366.467.365	4.374.968.274	4.525.231.332	4.395.825.170
6	Kota Binjai	702.167.562	804.308.313	885.211.617	945.566.274	849.614.205

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 4.2 Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah realisasi Belanja Daerah tampak selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 pendapatan yang di dapatkan untuk belanja daerah pada beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara relatif terus

mengalami peningkatan. Dan jumlah penduduk miskin memiliki nilai minimum pada Kota Binjai tahun 2013 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2016.

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara

Pendapatan Daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah. Faktor keuangan merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap kegiatan pemerintah. Kerena, semakin besar jumlah uang yang tersedia, semakin banyak pula kemungkinan kegiatan ataupun pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut data Realisasi Pendapatan Asli Daerah di beberapa Pada Pemerintah Kabupatean dan Kota Di Sumatera Utara.

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Tahun 2013-2017

No	Kabupaten dan Kota pada Pemerintah di Sumatera Utara	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp 000) Tahun 2013	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp 000) Tahun 2014	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp 000) Tahun 2015	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp 000) Tahun 2016	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp 000) Tahun 2017
1	Kab. Langkat	65.521.499	107.811.975	122.715.360	132.673.213	139.717.648
2	Kab. Deli Serdang	328.348.147	433.885.507	515.293.681	573.010.351	849.286.151
3	Kab. Serdang Bedagai	50.371.733	74.762.406	80.146.429	108.062.776	103.711.290
4	Kab. Karo	46.342.694	72.914.095	87.644.277	99.913.302	157.866.721
5	Kota Medan	1.206.169.709	1.515.685.947	1.489.723.189	1.535.435.344	1.739.756.924
6	Kota Binjai	49.172.644	71.967.138	78.327.793	97.339.498	139.217.622

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 4.2 Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan tampak selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 pendapatan yang di dapatkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara relatif terus mengalami peningkatan. Dan jumlah penduduk miskin nilai minimum pada Kabupaten Karo tahun 2013 dan nilai maksimum pada Kota Medan tahun 2017.

5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara

Menurut Kuznets (2009) Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemisknan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Berikut data Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Pada Pemerintah Kabupatean dan Kota Di Sumatera Utara.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Tahun 2013-2017

No	Kabupaten dan Kota pada Pemerintah di Sumatera Utara	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017
1	Kab. Langkat	5,97	5,12	5,03	4,98	5,05
2	Kab. Deli Serdang	12,79	7,50	5,24	5,32	5,10
3	Kab. Serdang Bedagai	5,97	5,12	5,05	5,14	5,16
4	Kab. Karo	4,72	5,09	5,01	5,17	5,21
5	Kota Medan	4,30	6,07	5,74	6,27	5,81
6	Kota Binjai	6,48	5,83	5,40	5,54	5,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 4.4 Menurut hasil survey Badan Pusat Statistik, jumlah Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan tampak selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017 pendapatan yang di dapatkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada beberapa pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara relatif terus mengalami peningkatan. Dan jumlah penduduk miskin nilai minimum pada Kota Medan tahun 2013 dan nilai maksimum pada Kabupaaten Deli Serdang tahun 2013.

B. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemiskinan	30	16720	209690	87182,67	62804,165
Belanja Daerah	30	70267562000	452523133200	1975258518633,33	1279676566696,398
Pendapatan Asli Daerah	30	46342694000	173975692400	462345717533,33	540280061719,268
Pertumbuhan Ekonomi	30	4,30	12,79	5,6857	1,47457
Valid N (listwise)	30				

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat variabel ukuran kemiskinan memiliki nilai minimum 16.720 pada Kota Binjai tahun 2014 dan nilai maksimum 209.690 pada Kota Medan tahun 2013. Nilai mean untuk variabel kemiskinan yaitu sebesar 87.182,67 dan nilai *Std. Deviation* 62.804,165 dengan total pengamatan sebanyak 30 sampel.

Variabel belanja daerah memiliki nilai minimum 7.0267.562.000 pada Kota Binjai tahun 2013 dan nilai maksimum 4.525.231.332.000 pada Kota Medan tahun 2016. Nilai mean untuk variabel belanja daerah yaitu sebesar 1.975.258.518.633,33 dan nilai *Std. Deviation* 1.279.676.566.696,398 dengan total pengamatan sebanyak 30 sampel.

Variabel ukuran pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum 4.6342.694.000 pada Kabupaten Karo tahun 2013 dan nilai maksimum 1.739.756.924.000 pada Kota Medan tahun 2017. Nilai mean untuk variabel pendapatan asli daerah yaitu sebesar 462.345.717.533,33 dan nilai *Std. Deviation* 540.280.061.719,268 dengan total pengamatan sebanyak 30 sampel.

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum 4,30 pada Kota Medan tahun 2013 dan nilai maksimum 12,79 pada Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2013. Nilai mean untuk pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,6857 dan nilai *Std. Deviation* 1,47457 dengan total pengamatan sebanyak 30 sampel.

C. Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh menunjukkan kondisi sebenarnya dan tidak bias sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*. Uji normalitas menggunakan tingkat signifikansi 5%. Berikut ini tabel Uji Normalitas Adalah :

**Tabel 4.6 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

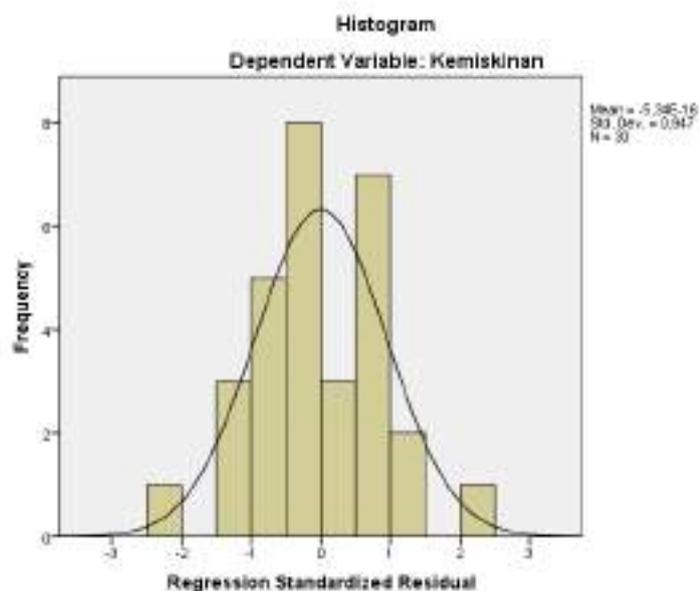
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	23271,97052238
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,071
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,487
Asymp. Sig. (2-tailed)		,972

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

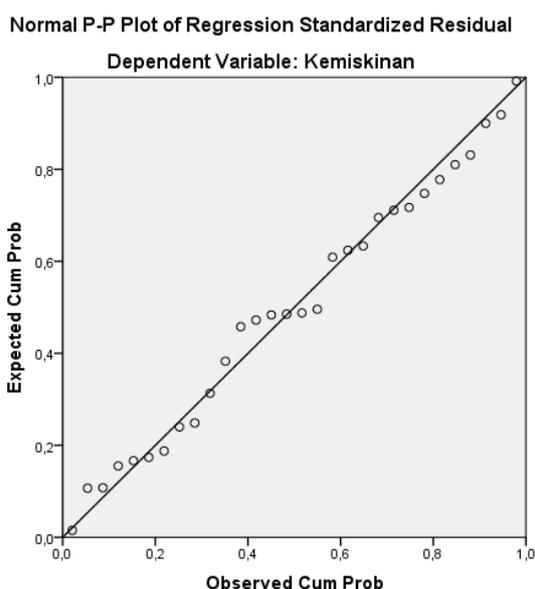
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,972 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 4.1

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Garis histogram di atas menunjukkan data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari grafik histogram yang menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini juga ditunjukkan pada hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik P-Plot yang terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.2

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Dari gambar scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu atau tidak beraturan, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini membuktikan bahwa pada model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen (Y adalah Kemiskinan) berdasarkan maaasukan independen (X adalah Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Berikut ini tabel Uji Multikolinearitas adalah :

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Belanja Daerah	,492	2,032
Pendapatan Asli Daerah	,494	2,024
Pertumbuhan Ekonomi	,994	1,006

a. Dependent Variable: Kemiskinan

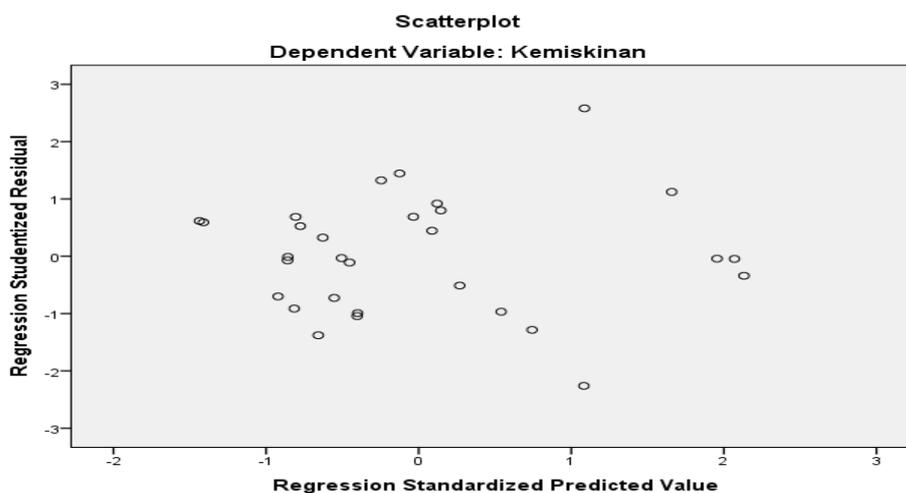
Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada interaksi variabel belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara karena masing-masing nilai *tolerance* berada di atas 0,10 dan juga nilai *VIF* yang berada dibawah 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu observasi yang lain. Apabila varians dari residual satu observasi ke observasi yang lain tetap

disebut homokedastisitas. Sedangkan apabila varians dari residual satu observasi ke observasi lain berbeda maka disebut heterokedastisitas. Berikut ini tabel Uji Heterokedastisitas adalah :



Gambar 4.3

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Berikut ini tabel Uji Autokorelasi adalah :

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	2,118

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi , Pendapatan Asli Daerah , Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Dalam penelitian ini karena menggunakan $n=30$, $k=3$, hasil uji autokorelasi didapatkan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,118, sesuai dengan tabel *Durbin Watson* pada *level of* signifikansi 0.05 maka diketahui $DL = 1,2138$, $DU = 1,6498$, $4-DU = 2,3502$, dan $4-DL=2,7862$.

Nilai *Durbin Watson* (DW) terletak antara batas atas atau *Upper Bound* (du) dan 4-du, yaitu $1,6498 < 2,118 < 2,7862$. Maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau tidak terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan periode sebelumnya dalam model regresi penelitian ini.

D. Metode Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui gambaran mengenai pengaruh ukuran belanja daerah (X1), pendapatan asli daerah (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3), terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera utara . Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1594,679	19114,049		,083	,934
1 Belanja Daerah	4,013E-008	,000	,818	7,892	,000
Pendapatan Asli Daerah	1,729E-008	,000	,149	1,438	,162
Pertumbuhan Ekonomi	-292,675	3103,945	-,007	-,094	,926

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$K = 1594,679 + 4,013BD + 1,729PAD + -292,679PE$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta (a) = 1594,679 menunjukkan harga kosntan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel kemiskinan (Y) sama dengan 1594,679 .
- Koefisien belanja daerah (X1) = 4,013, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan belanja daerah mengalami kenaikan 1 rupiah maka kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara akan mengalami kenaikan sebesar 4,013. Koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara belanja daerah (X1) dengan kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara (Y).
- Koefisien pendapatan asli daerah (X2) = 1,729, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1 rupiah maka kemiskinan pada pemerintah

kabupaten dan kota di Sumatera Utara akan mengalami kenaikan sebesar 1,729. koefisien bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara pendapatan asli daerah (X_2) dengan kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Y).

- d. Koefisien pertumbuhan ekonomi (X_3) = -292,675, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 orang maka kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara akan mengalami penurunan sebesar -292,675. koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa terjadi hubungan negatif pertumbuhan ekonomi (X_3) dengan kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Y).

E. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).

**Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1594,679	19114,049		,083	,934
Belanja Daerah	4,013E-008	,000	,818	7,892	,000
Pendapatan Asli Daerah	1,729E-008	,000	,149	1,438	,162
Pertumbuhan Ekonomi	-292,675	3103,945	-,007	-,094	,926

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai signifikansi t belanja daerah diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$, artinya belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Sehingga H_1 diterima dengan pengertian bahwa belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_1 ditolak dan sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Dari uji SPSS di peroleh nilai $t_{hitung} = 7,892$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = 7,892 > 2,0553$ t_{tabel} , maka H_1 diterima artinya belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara.

- 2) Nilai signifikansi t pendapatan asli daerah diperoleh sebesar $0,162 > 0,05$, artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara. Sehingga H_2 ditolak dengan pengertian bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Dari uji SPSS di peroleh nilai $t_{hitung} = 1,438$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = 1,438 < 2,05553 t_{tabel}$, maka H_2 ditolak artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

- 3) Nilai signifikansi t pertumbuhan ekonomi diperoleh sebesar $0,926 > 0,05$, artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sehingga H_3 ditolak dengan pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Dari uji SPSS di peroleh nilai $t_{hitung} = -0,094$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $t_{hitung} = -0,094 < 2,05553 t_{tabel}$, maka H_3 ditolak artinya pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 4.11 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	98680577638,831	3	32893525879,610	54,453	,000 ^b
Residual	15705953747,836	26	604075144,148		
Total	114386531386,667	29			

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah , Pendapatan Asli Daerah , Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Ini berarti hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$.

Dari uji SPSS di peroleh nilai $f_{hitung} = 54,453$. Uji yang dilakukan dua arah untuk mengetahui belanja daerah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kemiskinan. Maka diperoleh $f_{hitung} = 54,453 > 2,98 t_{tabel}$, maka artinya hasil uji F menunjukkan variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen yaitu terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya adalah 0 sampai 1, apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila R^2 besar (mendekati nilai 1) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.12 Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,929 ^a	,863	,847	24577,940

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber : diolah SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, besarnya nilai R Square (R^2) adalah 0.863 yang berarti sebesar 0.863 atau (86,3%) variabel independen belanja daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian seperti kinerja keuangan, tingkat pengangguran, inflansi, kurs,

dana alokasi umum, belanja langsung, dana bagi hasil, dan masih banyak lagi yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

F. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dengan hasil tersebut maka H_1 diterima.

Secara teoritis Belanja daerah merupakan Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Yuwono dkk, 2010 menyatakan bahwa “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Dengan kata lain suatu daerah bisa menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut jika belanja daerah itu digunakan dalam hal peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat pada daerah tersebut atau dengan menggunakan belanja daerah tepat sasaran, belanja daerah

juga bisa menambah jumlah kemiskinan jika alokasi yang digunakan tidak sesuai sasaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Rendy (2016) yang menjelaskan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dengan hasil tersebut maka H_2 ditolak.

Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Semakin besar jumlah pendapatan suatu daerah maka semakin rendahlah tingkat kemiskinan yang ada pada daerah tersebut, namun ada beberapa hal yang mungkin bisa mengakibatkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan pada penelitian ini diantaranya yaitu

tata kelola pendapatan suatu daerah itu yang mungkin belum tepat sasaran sehingga pendapatan asli daerah belum bisa menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Andyka (2015) yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Dengan hasil tersebut maka H_3 ditolak.

Secara teoritis, Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, Akumulasi Modal dan Kemajuan Teknologi.

Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan pada daerah tersebut akan berkurang, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun maka tingkat kemiskinan suatu daerah itu juga akan semakin bertambah.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswar (2016) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

4. Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa belanja daerah, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat mempengaruhi kemiskinan pada pemerintah dan kota di Sumatera utara, maka dari itu untuk pemerintah daerah seharusnya lebih teliti dalam hal menggunakan anggaran belanja daerah dengan cara mengeluarkan anggaran belanja daerah hanya untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya belanja daerah yang tidak terlalu penting dapat menambah tingkat kesulitan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan pendapatan daerah yang harus bisa digunakan untuk hal-hal yang khususnya dapat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi hal ini bisa terjadi jika taraf hidup masyarakat di suatu daerah sudah tercukupi maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa dikatakan baik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain :

1. Secara Parsial (Uji t) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
2. Secara Uji Simultan (Uji F) dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
3. Besarnya nilai R Square (R^2) atau koefisien determinasi adalah 0,863 yang berarti sebesar 0,863 atau (86,3%) variabel independen Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi, mampu menjelaskan Kemiskinan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Sedangkan sisanya sebesar 13,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian seperti kinerja keuangan, tingkat pengangguran, inflansi,

kurs, dana alokasi umum, belanja langsung, dana bagi hasil, dan masih banyak lagi yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Saran

Dari beberapa pembahasan diatas peneliti ingin memberikan saran agar bisa dijadikan bahan pertimbangan. Berdasarkan hasil dari analisis rasio dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran terhadap pemerintah pada kabupaten dan kota di sumatera utara, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak sampel yang akan di uji, sehinggakan diperoleh sampel yang banyak dan hasil lebih akurat, dan juga penelitian ini menyarankan untuk mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk di teliti selanjutnya dan Penelitian ini juga menyarankan untuk mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk di teliti selanjutnya.
2. Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan dan mengambil perananan yang cukup besar untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dengan menaikkan kapasitas produksi masyarakat agar mengurangi jumlah penduduk miskin pada pemerintah kabupaten dan kota di sumatera utara.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara disarankan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengalokasikan Belanja Daerah diharapkan Pemerintah Daerah melaksanakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintah daerah juga harus segera mengupayakan cara dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat, selain itu optimalisasi tersebut juga akan berguna bagi kemandirian daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Rendy Bayu (2016). *Pengaruh Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studdi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*.
- Chrisna, H. (2019). Analisis Kesiapan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Unpab Dalam Konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Dwilita, H. (2019). Perbandingan Kinerja Perbankan Indonesia Studi Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 145-162.
- Dwirandra dan Ani (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Pekanbaru*.
- Erlina, Sri Mulyani, (2010). *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama*, USU Press, Medan.
- Fadly, Y. (2015). Kondisi dan Kritik Sosial pada Masa Rezim Orde Baru dalam Puisi-Puisi WS Rendra.
- Ghozali, Imam, (2016). *Metode Penelitian : Teori Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas di Ponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuznets, Simon (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi : Cakrawala Ekonomi*, Jakarta
- Maisyarah, R., & Sofyardi, M. (2018, January). *The Effect of Rice Subsidyon The Expenditure of Public Family Consumption And Welfare of Poor Households. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*. Atlantis Press.
- Munir, Badrul (2010). *Teori Faktor Kemiskinan : Cakrawala Ekonomi*, Jakarta
- Nasution, A. P. (2018). Pengaruh *Independence In Fact & Independence In Appearance* Dalam Mempertahankan Sikap Independensi Pada Internal Auditor Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 154-164.

- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Nasution, D. A. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah-Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 101-114.
- Nasution, N. A. (2019). Tata cara pelaporan pajak terhutang surat pemberitahuan masa terhadap pajak pertambahan nilai pada Cv. Bina rekayasa. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 37-53.
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(2), 151-159.
- Praptomo, Andyka Arief (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan Dki Jakarta*.
- Ritonga, (2010). *Teori Kemiskinan*, Cetakan Ketiga,, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *JURNAL PERPAJAKAN*, 1(1), 80-94.
- Sakirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (edisi ketiga PT Rajagrafindo Persada, Jakarta).
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (*Fintech*) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sugiyono, (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kesembilan, CV Alfabete, Bandung.
- Suparmoko. (2009). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Talib, Aswar (2016). *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Pinrang*.
- Todaro, M.P & S.C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 tentang Belanja Daerah Urusan Kesehatan*. Jakarta: Erlangga.

Wauran, Amran Naukoko Patrick dan Paseki Meilen Gleri (2014). *Pengaruh Dana LAokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012*.

Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

Yunus, R. N. (2018). Analisis Pengaruh Bahasa Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Jurusan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 13-20.

Yuwono, Sony, Dkk. (2010). *Penganggaran Sektor Publik*. Bayumedia Publishing, Bandung.

Bappenas, 2004 tentang *Kemiskinan*.

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010. Tentang *Standar Belanja Daerah*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional dalam Belanja Daerah Urusan Pendidikan*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang *Ketenagalistrikan*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Pendapatan Asli Daerah*.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang *Teori Infrastruktur Jalan dalam Belanja Daerah Urusan Pekerjaan Umum*.